

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Arie S. Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budiono Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, cet , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, 1996, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastan Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- John Salindheo John, 1988, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Peter Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustofa dan Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas Tanah (Untuk industri)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurus Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, 2008. *Kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sitorus, S, 1998, *Evaluasi Sumberdaya Lahan*, Tarsito, Bandung.

Sumarjono S.W. Maria, 2008, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.

Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermesa, Jakarta.

Urip Santoso, 2006, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Lain

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 j.o. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 j.o Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 Tentang tentang
Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan
Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi.

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
21 tahun 1994 tentang tata Cra Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam
Rangka Penanaman Modal.

Jurnal dan Penelitian

Indra Ardiansah, 2010, “Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah
Didalam Kaitanya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar (Studi Kasus Pada
Wilayah Cisarua Kabupaten Bogor)”. Tesis, Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

Martina Desy Haripiana, 2016, “Peran Notaris Dalam Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah Komplek Kantor

Pemerintah Kabupaten Sekadau)". Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Anggitariani Rayi, 2020, "Perbandingan Prosedur Pelepasan Hak Atas Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Swasta Antara Kota Yogyakarta Dengan Kabupaten Sleman", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Christina Octavia, 2012, "Akta Pelepasan Hak Sebagai Syarat Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Badan Hukum (Tinjauan Yuridis Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor: 6070HGB.32.75/300/XII/2010)", *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas hukum, Universitas Indonesia

Dwi Heny Ratnawati dan Djauhari, 2018, "Pelaksanaan Akta Pelepasan Hak Sebagai Alas Hak Untuk Mengajukan Permohonan Peralihan Dan Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir Di Kabupaten Brebes". *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung , Semarang

Website

Idris Rusadi Putra., 2021, *Badan Pertanahan Nasional : 4(empat) aturan Turunan UU Cipta Kerja untuk Proses Lebih Sederhana dan Mudah* (Internet), <https://www.merdeka.com/uang/bpn-4-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-untuk-proses-lebih-sederhana-dan-mudah.html>, diakses 1 Mei 2021.